



Naik, Target Pajak PBB ✓ Kota Rp 167 Miliar

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Memasuki awal 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta langsung tancap gas. Akhir pekan lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Target tahun ini, Pemkot Yogyakarta mematok 97.801 lembar SPPT PBB-P2 yang disampaikan total nominal ketetapan sekitar Rp 167,7 miliar. Naik dari realisasi tahun 2025 sebanyak Rp 134,8 miliar atau melebihi target sebesar 103,73 persen.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini menjelaskan, pihaknya optimistis target Rp 167,7 miliar bisa terbayarkan. Terlebih, untuk pembayaran PBB-P2 tahun ini, SPPT dilengkapi



Ini akan menjadi salah satu program unggulan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di mana, masyarakat ketika menerima SPPT itu kapan pun mau bayar, sambil tiduran pun bisa, semudah kita belanja online."

QR CODE. Yaitu, platform pembayaran secara digital.

"Ini akan menjadi salah satu program unggulan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di mana, masyarakat ketika menerima SPPT itu kapan pun mau bayar, sambil tiduran pun bisa, semudah kita belanja online.

■ **Baca NAIK...** Hal II

Naik, Target Pajak PBB Kota Rp 167 Miliar

sambungan dari hal. Jogo Jogja

Harapannya nanti masyarakat dengan kemudahan pembayaran itu percepatan pembayarannya dapat segera dilaksanakan," kata Andarini, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, berkaca pada penerimaan pajak tahun 2025, bisa tercapai target. Penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta terealisasi sebanyak Rp 134,8 miliar atau melebihi target sebesar 103,73 persen.

"Terkait adanya perbedaan data objek pajak PBB-P2, diakui menjadi pekerjaan rumah sehingga BPKAD Kota Yogyakarta akan melakukan pendataan kembali objek pajak. Masyarakat juga diharapkan bisa melaporkan ke BPKAD Kota Yogyakarta

jika ada perubahan objek pajak," katanya.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, Pemkot Yogyakarta membagikan SPPT PBB-P2 tahun 2026 kepada wajib pajak melalui kelurahan di Kota Yogyakarta di awal tahun. Diharapkan dengan pembagian SPPT PBB-P2 lebih awal, masyarakat bisa mengetahui lebih dini ketentuan PBB-P2 dan membayarkan lebih awal.

Hasto mengaku telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta untuk bisa menyiapkan pekerjaan di bulan November-Desember lalu. Sehingga Januari ini sudah mulai

pengerjaan. Tidak hanya soal pembagian SPPT PBB-P2, tapi juga lelang pekerjaan.

Dia berharap dengan penyampaian SPPT PBB-P2 lebih dini membuat masyarakat bisa mempersiapkan diri dan membayar lebih awal. "Januari harus *start*, ya, jangan Januari itu persiapan *gitu*. Harapan saya, sebetulnya masyarakat tahu lebih dini (sehingga) SPPT disampaikan lebih dini," katanya.

Hasto mengapresiasi SPPT PBB-P2 yang dilengkapi dengan QR CODE tutorial pembayaran dan QRIS dinamis untuk pembayaran secara digital. Masyarakat akan dimudahkan dengan pembayaran PBB-P2 secara

digital dengan *scan* QRIS.

Namun demikian, Hasto menegaskan Pemkot Yogyakarta masih melayani pembayaran SPPT PBB bagi masyarakat yang belum bisa mengakses pembayaran secara digital.

Hasto juga menyoroti soal keadilan dalam pembayaran pajak. Hal itu terkait data objek PBB-P2 yang harus diperbarui dengan mengecek ulang di lapangan.

Dicontohkan terkait adanya data objek pajak yang ditagihkan berbeda dengan di lapangan yang dimiliki wajib pajak. "Itu semua harus diharmonisasi. Ya, ini terus menerus dilakukan di lapangan, diperiksa ulang," ujarnya. (*eri/amd/wa*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005